

MEMBANGUN VISI-MISI UPI SEBAGAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN YANG RELIGIUS

Oleh: Munawar Rahmat

Abstrak

Era global disebut-sebut sebagai era persaingan yang sangat ketat, “*the age of complexity and chaos*”, sekaligus sebagai era kerjasama dan kesalingtergantungan. Mencermati perubahan-perubahan global dan regional serta empat pilat pendidikan Unesco, maka visi-misi pendidikan nasional dirumuskan dalam 6 pont berikut: pemerataan-perluasan dan kualitas, persaingan dan keunggulan, keterkaitan pembangunan pendidikan dengan pembangunan lainnya, masyarakat belajar, pendidikan untuk masa kini dan masa depan, dan memperkuat jati-diri bangsa serta mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Era keterbukaan dan krisis ekonomi mendorong universitas-universitas (negeri maupun swasta) membuka kelas-kelas jauh, yang tentu kualitasnya akan jauh di bawah kelas kampus induk. Lulusan perguruan tinggi pun akhir-akhir ini begitu membludak. Dan kritik pedas yang ditujukan kepada dunia pendidikan kita adalah bahwa system dan proses pendidikan yang ada kurang sekali memperhatikan pembentukan kepribadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis. Akibat kongkritnya antara lain membengkaknya angka pengangguran sarjana.

UPI beruntung tidak ikut arus ini sehingga memiliki peluang yang besar untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Ke depan, **visi UPI** tampaknya perlu dirumuskan sbb: Menjadikan UPI pada tahun 2015 sebagai univeritas riset yang melayani (*service-driven university*), memberdayakan, entrepreneurial, memasarkan-diri (*market-ing*), dan tentunya religius. Kampus “religius” yang menjadi moto UPI selama ini jangan hanya jargon belaka, tapi harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan kampus maupun secara kurikuler.

Kata kunci: Visi-misi UPI, visi-misi pendidikan nasional, tantangan global, universitas pendidikan, kampus religius

A. PENDAHULUAN

Artikel ini menguraikan perubahan yang sedang terjadi pada tataran global dan nasional untuk memberikan konteks pada pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selanjutnya, diuraikan mengenai visi yang mendasari pembangunan pendidikan di Indonesia beserta misi yang diemban oleh pendidikan nasional. Pada bagian berikutnya, artikel ini mengangkat tantangan-tantangan yang dihadapi serta keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh UPI dalam memasuki era Globalisasi.

Pada saat ini kita sudah memasuki abad ke-21 atau milenium ketiga yang disebut-sebut sebagai datangnya era globalisasi. Ciri utama era globalisasi adalah

terjadinya persaingan yang makin ketat, tetapi pada saat bersamaan kerjasama dan kesalingtergantungan juga makin kuat. Tahun ini, atau tepatnya sejak tahun 2003, kita sudah memasuki era pasar bebas ASEAN dan tahun 2020 berlaku pasar bebas Asia-Pasifik (APEC).

Sebagian orang juga menyebut era sekarang dan yang akan datang sebagai “*the age of complexity and chaos*” yang ditandai oleh usangnya berbagai teori lama serta cara berfikir linier dan konvensional dalam menghampiri persoalan yang dihadapi. Sebagai penggantinya, dituntut cara pendekatan baru, teori baru, perspektif baru, karena realitas persoalan yang dihadapi juga berbeda dengan di masa-masa sebelumnya.

Asumsi yang mendasari artikel ini ialah era globalisasi mempunyai implikasi terhadap perlunya reformasi pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk tentunya bagi UPI. Tujuannya agar perguruan tinggi mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi, mengantisipasi, dan merespons tantangan dan perubahan yang sedang dan akan terjadi. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pembaharuan, maka pendidikan tinggi akan ketinggalan oleh irama perubahan.

Pada saat yang sama negeri kita dihantam badai kritis moneter, yang kemudian menggelinding menjadi krisis ekonomi dan berbagai krisis kehidupan yang multi dimensional. Dalam perspektif politik nasional ada untungnya, yaitu tumbuhnya arus gerakan reformasi. Tapi krisis ekonomi yang menghantam mayoritas rakyat yang tidak mampu telah melumpuhkan, atau sekurang-kurangnya mengerem laju reformasi. Semangat membangun bidang pendidikan, antara lain dengan diundang-undangkannya dana pendidikan – untuk sektor pendidikan – sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, baru berhasil di bidang perundang-undangkannya. Di tataran realisasi masih penuh tanda tanya besar, kapankah anggaran 20% tersebut dapat terwujud!

Krisis ekonomi menghantam juga pendanaan perguruan tinggi negeri yang selama ini mengandalkan dana bersumber pemerintah. Berbagai kiat dilakukan para petinggi perguruan tinggi untuk mendongkrak kekurangan dana. Ada yang memperbanyak jumlah mahasiswa (bahkan dengan membuka kelas-kelas tutorial/parallel/kelompok belajar, dan istilah-istilah lainnya, untuk menyebutkan kelas-jauh), ada yang menaikkan dana sumbangan mahasiswa, ada yang menjual riset dan pengembangan bagi dunia usaha, dan ada pula yang menggali dana dari luar negeri. UPI antara lain meraih dana yang cukup signifikan dari JICA-Jepang dan dari *Islamic development Bank* (IDB).

Gencarnya berbagai perguruan tinggi (negeri ataupun swasta) yang membuka kelas-kelas baru, baik di pusat kampus ataupun di daerah-daerah, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UPI. Dari program studi sejenis, terutama program-program studi pendidikan disiplin ilmu, tantangannya adalah terkesankannya bahwa pendidikan disiplin ilmu itu sangat mudah, karena kita “meragukan” kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan cara-cara seperti demikian; sementara UPI masih tetap konsisten dengan cara-cara konvensional, dalam artian menjaga kualitas dengan system dan waktu yang tidak berubah. Perguruan Tinggi lain, dalam hal ini yang sejenis, menyelenggarakan pendidikan di luar kampus induk, sementara UPI lebih mengembangkan ke arah multi kampus. Perguruan Tinggi lain, dalam hal ini yang sejenis, mempersingkat waktu semesteran dari 6 bulan menjadi 4 bulan, tapi UPI tetap

mempertahankan waktu semesteran yang 6 bulan. Dengan cara-cara seperti ini, paling tidak untuk saat sekarang, perguruan tinggi lain memang meraih dana yang lebih besar.

Tapi situasi seperti ini sebenarnya menjadi peluang bagi UPI di masa yang akan datang. Pengalaman selama beberapa dasawarsa yang lalu terbukti bahwa perguruan tinggi yang menjual murah keserjanaan akhirnya memperoleh akibat buruk dari kinerjanya. Masyarakat, dan terutama instansi pemerintah, tidak mempercayai lagi perguruan tinggi yang menjual murah keserjanaan itu. Dalam situasi demikian, masyarakat pada akhirnya hanya akan mempercayai perguruan tinggi yang benar-benar menjaga kualitas. Dan inilah kemenangan bagi UPI di masa mendatang. Citra baik sangat mahal harganya. Dan inilah yang dimiliki UPI. Di saat masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada perguruan tinggi yang menjual murah keserjanaan, UPI malah akan semakin berkualitas. Tingkat pendidikan dosen dan karyawan akan semakin meningkat. Jumlah dosen yang berpendidikan doktor (S3) akan semakin banyak. Seluruh dosen berpendidikan serendahnya magister (S2). Hanya dosen-dosen baru saja yang masih berpendidikan S1. Itu pun hanya dipilih mereka yang benar-benar potensial.

Di tingkat nasional, di saat IKIP-IKIP negeri berubah menjadi Universitas Negeri (artinya sama dengan universitas lain), hanya UPI yang mempertahankan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Ketika eks-eks IKIP "menganak-tirikan" kedua disiplin ini, UPI justru mempertahankan kebesaran kedua disiplin ini. Ketika eks-eks IKIP membesarkan program studi disiplin ilmu, hanya UPI yang membesarkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Disiplin ilmu lain bagi UPI lebih sebagai memperkuat pendidikan disiplin ilmu. Di masa depan masyarakat hanya akan melirik UPI sebagai jagonya disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.

B. PEMBAHASAN

1. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Untuk merespons kecenderungan-kecenderungan tersebut, Dedi Supriadi (1997) mengajukan pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada enam visi. Keenam visi berikut dikembangkan dan diperluas sbb:

(1) Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

Pada awal abad ke-21 sebagian besar anak Indonesia pada rentang usia 7-15 tahun diharapkan telah berada di pendidikan dasar dan dapat menempuh pendidikan sampai tamat. Inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dimulai pada tahun 1994 dan diproyeksikan (saat itu) dapat dituntaskan dalam dua Repelita (10 tahun), yaitu tahun 2004. Peningkatan rata-rata pendidikan bangsa Indonesia yang diupayakan melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun akan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan nasional.

Proyeksi program wajib belajar 9 tahun dapat tuntas tahun 2004 ternyata tidak terbukti, karena hingga kini angka melanjutkan studi ke SLTP masih rendah dan angka putus sekolah SLTP masih tinggi. Penyebab utamanya mungkin karena krisis moneter

tahun 1997 yang mengakibatkan krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya di Indonesia. Hingga kini bangsa kita belum keluar dari krisis yang multidimensional itu.

Bersamaan dengan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, **semakin taat pula tuntutan** masyarakat dan pembangunan nasional akan perlunya pendidikan yang lebih bermutu, relevan, adil, manusiawi, dengan menjangkau semua orang : yang miskin, yang terpencil, yang cacat, yang normal, yang cerdas. Jadi dimensi *horisontal* (jangkauan populasi atau pemerataan) dan *vertikal* pendidikan (yaitu kualitas, relevansi, efesiensi) semakin berkembang.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerataan dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagaimana dikemukakan dalam deklarasi UNESCO, harus secara merata menjangkau mahasiswa yang kurang beruntung. Pengertian pendidikan untuk semua dewasa ini bukan hanya menyangkut pemerataan kesempatan, yaitu akses pendidikan untuk semua (*education access for all*), melainkan mengarah pada pemerataan mutu pendidikan, yaitu pendidikan yang bermutu untuk semua (*quality education for all*).

(2) Pengembangan wawasan persaingan dan keunggulan

Bangsa Indonesia harus memiliki keunggulan sehingga dapat bersaing secara global dan dapat diperhitungkan dalam peredaran global. Kuncinya adalah tersedianya pendidikan bermutu. Wawasan keunggulan diperlukan karena masyarakat Indonesia dan dunia terus berubah dalam irama yang semakin cepat. Salah satu aspek dari wawasan keunggulan ialah bahwa bangsa Indonesia perlu melihat posisinya di tengah bangsa-bangsa lain. Misalnya, dalam mutu pendidikan yang antara lain ditunjukkan oleh prestasi siswa, sejauh manakah mutu pendidikan kita dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara-negara lain yang telah lebih dahulu maju. Semangat bersaing dikembangkan bersamaan dengan semangat kerjasama, selaras dengan ciri kehidupan global yaitu “*to compete in order to cooperate; to cooperate in order to compete*”.

Dewasa ini, mutu pendidikan suatu negara tidak lagi hanya diukur berdasarkan kriteria dalam negara itu, melainkan dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini berarti bahwa mutu pendidikan suatu negara, termasuk Indonesia, harus dapat bersaing dengan negara-negara lain. Dengan demikian, kita dapat melihat posisi bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain sehingga kita merasa terpacu untuk meningkatkan mutu. hal ini memberikan tantangan karena pada saat yang sama kita dituntut untuk lebih memeratakan kesempatan dan mutu pendidikan di antara berbagai daerah, sebagaimana diamanatkan oleh GBHN.

Di banyak negara, sekarang semakin banyak studi dilakukan yang membandingkan prestasi pendidikan antar negara. Misalnya, Stevenson dan Stigler (1992) dalam *Learning Gap* membandingkan mutu pendidikan Amerika Serikat dengan Jepang, Cina, Taiwan. Dokumen *A Nation at Risk* (1982) dan *America 2000 ; An Education Strategy* (1991) yang mendasari pembaruan pendidikan Amerika Serikat sejak tahun 1980-an juga dilandasi semangat bersaing dan kekhawatiran yang mendalam bahwa mutu pendidikan mereka terlampaui oleh negara-negara lain. Bahkan sampai prestasi membaca yang menjadi modal belajar juga dibandingkan sebagaimana dituangkan dalam laporan Elley untuk IEA (1992) dalam judul, *How in the World Do Students Read ?* Dalam laporan ini misalnya dikemukakan bahwa prestasi membaca

anak-anak Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 27 negara disurvei, satu tingkat lebih tinggi dari Venezuela.

Kecenderungan tersebut melahirkan lapangan studi baru yang makin populer yaitu pendidikan perbandingan (*comperative education*). Kalau di masa lalu bidang studi ini lebih banyak memusatkan perhatian pada perbandingan sistem pendidikan antar negara, sekarang banyak mengkaji perbandingan internasional dalam kinerja sistem pendidikan yang terutama ditunjukkan oleh prestasi mahasiswanya.

(3) Memperkuat keterkaitan pendidikan agar sepadan dengan kebutuhan pembangunan

Pendidikan nasional harus memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional. Dengan cara itu, pendidikan akan mampu menunjang pembangunan nasional melalui penyediaan sumber daya manusia yang lebih bermutu dan dalam jumlah yang memadai. Hal ini mengimplikasikan bahwa pendidikan bukan hanya ditujukan untuk pendidikan itu sendiri, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, yaitu menunjang terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi secara sistematis dan terarah untuk meningkatkan martabat dan taraf hidup bangsa Indonesia.

Apabila pertumbuhan ekonomi dijadikan kriteria keberhasilan pembangunan, maka studi di 192 negara yang dikutip dalam *Human Development Report 1996* (UNDP, 1996) mencatat bahwa sebanyak 65% dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia yang makin bermutu dan akumulasi investasi yang besar yang digunakan untuk pembangunan.

Visi keterkaitan dan kesepadanan juga mengandung pengertian bahwa pendidikan merupakan sektor yang berada di titik sentral dalam seluruh kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya. Apabila tidak demikian, maka seluruh upaya pendidikan menjadi kurang mempunyai arti bagi pembangunan, betapun secara kuantitatif dapat menghasilkan banyak lulusan atau menampung mahasiswa dalam jumlah yang besar.

Di samping itu, hasil dari proses pendidikan bukan hanya diukur dari apa yang diketahui (*know what*), melainkan apa yang secara nyata dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan (*know-how*). Begitu juga dengan dunia kerja dan masyarakat cenderung lebih melihat apa yang seseorang dapat tampilkan (*what one can do*) daripada hanya secarik ijazah. Pendidikan juga semakin dipandang sebagai instrumen yang ampuh untuk mobilitas sosial (Djojonegoro, 1995).

(4) Mendorong terciptanya masyarakat belajar

Masyarakat Indonesia masa depan, tanpa memandang usia dan tingkat pendidikannya, adalah masyarakat yang memiliki kehendak, kemauan, dan kemampuan untuk belajar atas prakarsanya sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan – atau masyarakat belajar dan membaca (*learning and reading society*). Melalui proses belajar tersebut, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu indikator penting dari masyarakat belajar ialah masyarakat yang mempunyai kebiasaan membaca dan belajar (*reading and learning habits*). Untuk itu,

akses terhadap sumber-sumber belajar perlu diperluas dalam bentuk pendidikan berkelanjutan, kelompok-kelompok belajar, perpustakaan, taman-taman bacaan, dan lain-lain. Peluang ke arah itu juga dibuka dengan makin berkembangnya teknologi informasi termasuk media cetak, media elektronik, internet. Pada saat yang sama dilakukan kampanye minat baca dan bimbingan belajar untuk mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat.

(5) Pendidikan untuk masa kini dan masa depan

Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan generasi masa kini dan sekaligus masa depan. Hal ini mengandung pengertian bahwa proses pendidikan yang dilakukan pada saat ini bukan semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk masa depan. Berkaitan dengan visi ini, pendidikan dimana pun selalu mengenal rentang waktu ke depan (*lead time*) dan *irreversible* yaitu jarak waktu antara seseorang dididik atau waktu yang diperlukan untuk proses pendidikan dengan saat lulusan pendidikan menggunakan kemampuannya ; misalnya SD adalah 6 tahun, SLTP selama 9 tahun, SLTA adalah 12 tahun, Sarjana (S-1) adalah 16 tahun, Magister (S-2) sekitar 18-19 tahun, dan Doktor (S-3) sekitar 21-25 tahun.

Iniilah yang kemudian melatarbelakangi diskusi dan kepedulian terhadap pendidikan yang berorientasi ke masa depan (*education for tomorrow*) sebagaimana banyak dikaji oleh para ahli futurologi pendidikan, misalnya Tilaar (1990). Lama waktu yang diperlukan untuk mendidik seseorang berkorelasi dengan kemampuannya untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat dan bangsanya.

(6) Fungsi pendidikan dalam memperkuat jati diri bangsa dan mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik

Pendidikan merupakan sarana untuk memperkuat jati diri bangsa dalam memasuki era globalisasi dan mendorong terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dalam memasuki zaman baru pada abad ke-21. Pembangunan pendidikan harus mampu memantapkan jati diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga dalam keadaan bagaimanapun, bangsa Indonesia tetap tampil sebagai bangsa Indonesia dengan segala kepribadiannya.

Di sisi lain, pendidikan harus mampu mengembangkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan perkembangan dan semangat zaman (*Zeitgeist*). Semangat zaman baru ditandai oleh dominannya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, nilai-nilai budaya baru yang mendorong perkembangan iptek juga perlu terus dikembangkan seperti sikap ilmiah, rasa ingin tahu, etos kerja, ketepatan waktu, orientasi pada mutu, dan penghargaan pada prestasi.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi pendidikan adalah mendidik generasi bangsa agar mempunyai kesiapan untuk memasuki masa depan (abad ke-21). Dalam mengemban misi tersebut, pendidikan dituntut untuk semakin bermutu, semakin relevan, semakin merata, dan semakin efisien. Kurikulum pendidikan dituntut untuk lebih tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Segala potensi bangsa perlu dikerahkan untuk mendukung program-program pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan.

2. Tantangan UPI Ke Depan

Salah satu kritik yang ditujukan kepada dunia pendidikan kita adalah bahwa system dan proses pendidikan yang ada kurang sekali memperhatikan pembentukan kepribadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis. Beban mata kuliah dengan jumlah SKS yang begitu banyak telah mempersempit ruang kreasi bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai calon sarjana yang mandiri, yang mampu merespon lingkungan sosialnya secara kreatif. Dalam benak mahasiswa terdapat dua target utama yang selalu memenuhi pikirannya. Pertama, bagaimana memenuhi target SKS yang telah ditetapkan agar segera berhasil meraih "titel" kesariaannya, dan kedua, bagaimana memperoleh "pekerjaan" dengan modal ijazah yang diraihinya.

Dengan ungkapan lain, tujuan utama masuk perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan "harga jual" dirinya dalam pasaran kerja, namun kurang disertai kualitas leadership dan entrepreneurship. Iklim pendidikan semacam ini akan melahirkan sarjana dengan orientasi "*having mode*" bukannya "*being mode*"; lebih menekankan orientasi "*to have*" bukannya "*to be*". Mereka itu adalah para sarjana yang memiliki semangat untuk memperoleh materi sebanyak mungkin, tapi kurang diimbangi dengan semangat mencipta dan mengabdikan untuk kepentingan sesama manusia.

Kondisi demikian cukup buruk di masa lalu, terlebih-lebih lagi di masa yang akan datang. Memasuki era globalisasi, pendidikan tinggi harus menyebarkan secara masal pengetahuan dan ketrampilan kerja yang terus berkembang, diadaptasikan dengan peradaban dan didorong oleh pengetahuan. Pendidikan harus secara simultan menyediakan peta dunia yang rumit dan kalut, serta sebagai kompas bagi para mahasiswa untuk menemukan jalan keluarnya sendiri.

UNESCO merekomendasikan pendidikan yang didasarkan pada empat pilar pendidikan yang paling fundamental, yang sepanjang hayatnya dapat dikatakan sebagai sokoguru pengetahuan, yaitu:

(1) Belajar untuk mengetahui (*learning to know*)

Belajar bukan hanya untuk memperoleh informasi yang sudah dirinci dan disusun secara sistemik, melainkan untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan, baik sebagai alat ataupun sebagai tujuan hidup.

Sebagai alat, instrumen-instrumen pengetahuan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada setiap mahasiswa untuk: (a) memahami lingkungannya agar dapat hidup berharkat di tengah-tengah masyarakatnya, (b) mengembangkan ketrampilan kerja, dan (c) untuk dapat berkomunikasi. Sedangkan sebagai tujuan, instrumen-instrumen pengetahuan diharapkan mendorong mahasiswa agar gemar untuk mengetahui, memahami, dan menemukan. Metode ilmiah perlu dibekalkan kepada mahasiswa. Ringkasnya, mahasiswa perlu dibekalkan pendidikan umum yang memadai dan spesialisasi yang mendalam.

Dengan semakin derasnya informasi dan semakin bertumpuknya terbitan-terbitan buku baru, maka kurikulum UPI ke depan perlu dikaji-ulang setiap tahun. Mahasiswa perlu dibekali ilmu-ilmu yang benar-benar esensial. Pendidikan umum perlu diarahkan untuk membentuk manusia yang paripurna, manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, manusia-manusia yang selalu resah dengan kelemahan SDM dan selalu peduli untuk meningkatkan kualitas umat, serta pribadi-

pribadi yang mandiri dan selalu siap berubah ke arah yang lebih baik. *Key concept* disiplin ilmu perlu dikaji ulang dan *learning skill* mahasiswa perlu dilatihkan disertai pembentukan *curiosity*.

Di era globalisasi ini bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, memegang peranan penting sebagai kunci pembuka berbagai ilmu pengetahuan. Referensi ilmu pengetahuan dewasa ini kebanyakan berbahasa Inggris. Sekarang ini jangan pun bagi mahasiswa non-Bahasa Asing. Pada mahasiswa yang memilih program studi bahasa asing pun masih sangat sulit menguasai bahasa asing tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa selama ini kita "gagal" membekalkan bahasa asing kepada para mahasiswa. Pendekatan baru, strategi baru, dan metode baru perlu terus dikaji dan diimplementasikan agar mahasiswa UPI di masa depan mahir berbahasa asing, khususnya Bahasa Inggris. Lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren-pesantren yang telah berhasil membekalkan bahasa asing, di masa depan perlu diimplementasikan di UPI. Mungkin untuk tahap awal, sebagian dosen secara berombongan dibekalkan kemampuan berbahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris. Di Pare Kediri dikenal lembaga-lembaga pendidikan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang berhasil mendidik para pelajar dan mahasiswa mahir berbahasa Inggris dan asing lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Di sana diciptakan area-area berbahasa asing. STAIN Malang disebut-sebut telah mengimplementasikan *Arabic Area* dan *English Area*. Jika benar dan terbukti berhasil, ke depan UPI perlu mengimplementasikan cara-cara demikian. Selain itu, komputer dan internet perlu dibekalkan kepada seluruh mahasiswa UPI.

(2) Belajar berbuat (*learning to do*)

Belajar untuk berbuat lebih terkait erat dengan bidang vokasional. Tapi bidang vokasional yang bagaimanakah yang dapat membekalkan mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Masa depan ekonomi industri tergantung pada kemampuan untuk mengubah pengetahuan menjadi sebuah inovasi yang melahirkan bisnis dan pekerjaan baru. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan yang selalu siap berubah sesuai dengan tuntutan, dan bukannya sebagai sebuah praktek rutin.

Pertama, dari ketrampilan ke kompetensi

Kemajuan teknologi yang sangat cepat tak terhindarkan menuntut suatu kompetensi yang lebih bersifat mental dan intelektual, ketimbang ketrampilan psikomotorik belaka. Pekerjaan baru menuntut seperangkat kompetensi yang berkaitan dengan ketrampilan teknik dan vokasional, tingkah laku sosial, kemampuan bekerja dalam sebuah tim, serta kesanggupan untuk mengambil prakarsa dan resiko. Oleh karena itu para mahasiswa perlu dibekalkan ketrampilan-ketrampilan dasar hidup (*basic life skills*). Komitmen pribadi dari setiap pekerjaan dianggap sebagai agen perubahan yang dipadukan dengan pengetahuan dan ketrampilan kerja, di antaranya kompetensi berkomunikasi (termasuk kompetensi melobi dan menegosiasi), kompetensi bekerja dalam sebuah tim, dan kompetensi pengelolaan konflik serta memecahkan perselisihan. Kurikulum mata kuliah dasar umum (MKDU) perlu diubah ke arah pembentukan *basic life skills* tersebut.

Kedua, dematerialisasi pekerjaan dan berkembangnya sektor jasa

Sektor jasa berubah secara cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jasa-jasa sekarang ini sangat beragam, bahkan sangat sulit mencari suatu sektor yang tanpa jasa. Di masa lalu, sektor jasa terbatas pada jasa-jasa sosial, pendidikan, kesehatan, dan sedikit di bidang perbankan. Tapi sekarang ini sektor jasa memerlukan suatu kemampuan khusus yang lebih tinggi dibanding sebelumnya dan juga timbulnya segala jenis kepakaran: Pakar pemantau teknologi, pakar jasa-jasa konsultan, keuangan, akunting, dan manajemen. Dan yang lebih penting dari kedua jenis jasa tersebut (tradisional ataupun modern) adalah jasa di bidang informasi dan komunikasi. Kedua bidang jasa ini menjadi sangat penting, yakni bahwa penekanan diletakkan pada kemampuan pribadi untuk menyerap dan mengolah informasi khusus untuk tujuan khusus.

Selain kemampuan-kemampuan itu, kemampuan *human relation* di sektor jasa sangat penting. Ketrampilan berkomunikasi (*communication skill*), ketrampilan negosiasi (*negosiation skill*) dan ketampilan melobi (*lobbying skill*) merupakan ketrampilan-ketrampilan yang sangat diperlukan untuk bekerja di sektor jasa.

Bidang pendidikan jelas sekali merupakan sektor jasa. Dalam era "masyarakat belajar", bidang pendidikan akan selalu dilirik masyarakat. Ketika negara-negara lain mengirimkan guru-guru dan ahli pendidikannya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, UPI perlu membekalkan kompetensi serupa agar para lulusan UPI bukan saja dapat bertahan di negerinya sendiri, tapi juga dipakai dan dipercaya oleh negeri-negeri lain.

Ketiga, pergeseran bekerja dari sektor formal ke ekonomi informal

Bersama-sama dengan sektor formal yang lebih kecil dan sektor pertanian terdapat sektor yang didasarkan pada perdagangan dan keuangan. Kedua sektor terakhir ini modern dan informal serta lebih menguntungkan. Para petani boleh mendapat untung sedikit atau bahkan merugi, tapi para pedagang di sektor pertanian (bibit, pupuk, dan hasil pertanian) tetap meraup keuntungan. Pegawai Negeri Sipil – yang di masa lalu, bahkan juga sekarang sangat diburu oleh para lulusan sekolah dan universitas – di masa depan akan sangat berkurang. Ketrampilan berwirausaha (*entrepreneurial skill*) sangat penting untuk dibekalkan kepada para mahasiswa, termasuk kepada mahasiswa UPI.

(3) Belajar hidup bersama (*learning to life together*)

Era globalisasi suka atau tidak suka sudah memasuki (hampir) semua negara. Migrasi merupakan dampak dari globalisasi. Desa-desanya ditinggalkan dan orang dari berbagai pelosok memadati kota-kota. Dengan dibukanya pasar bebas, migrasi menjadi mendunia. Setiap bangsa dari suatu negara bisa memasuki negara manapun.

Untuk itulah di era global diperlukan kemampuan belajar hidup bersama, yakni belajar hidup dengan orang lain yang belainan suku, bangsa dan agama. Mahasiswa perlu dibekalkan kemampuan hubungan sosiometrik, yakni: ramah terhadap orang lain, simpatik, peduli, dan memiliki sosiabilitas yang tinggi.

Lulusan UPI ke depan jangan hanya bekerja dan mengabdikan dengan mengandalkan wilayah Jawa Barat dan Banten saja tapi harus siap bekerja dan

mengabdikan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga di ASEAN dan negara-negara lain. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di UPI perlu benar-benar dibina dan disiapkan untuk mendidik para mahasiswa yang pandai hidup bersama dengan suku bangsa, etnis, bangsa, dan agama mana pun.

(4) Belajar menjadi seseorang (*learning to be*)

Tujuan utama pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya agar mampu berpikir kritis dan mandiri dalam membuat suatu keputusan untuk kehidupannya. Pendidikan harus membekalkan kemampuan kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan memikul tanggung-jawab sendiri.

Dengan membekalkan ketiga pilar pendidikan (belajar mengetahui, belajar untuk bekerja, dan belajar hidup bersama) maka mahasiswa perlu memiliki kemampuan memadukannya sehingga ia menjadi seseorang yang berharga.

Bagaimanakah menerapkan keempat pilar pendidikan yang dipromosikan oleh UNESCO tersebut?

Pertama, kurikulum perlu diubah menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Departemen Pendidikan Nasional telah menggelindingkan kurikulum baru ini dan sudah diuji-cobakan di beberapa SD, SMP dan SMA. Rencananya KBK ini akan diterapkan pada tahun ajaran 2004-2005 ini. Tapi tampaknya masih ada kendala di lapangan. Sekolah-sekolah kita, terutama lagi guru-guru kita belum siap melaksanakan KBK. Perlu diadakan sekolah-sekolah "model" yang menerapkan KBK, sedikitnya di setiap kecamatan ada 1 SD Model, dan di setiap 3 kecamatan ada 1 SMP dan di setiap kabupaten ada 3 SMA Model yang menerapkan KBK. Baru kemudian KBK diterapkan di seluruh sekolah.

Sebagai bahan uji-coba, mungkinkah UPI ke depan mengimplementasikan perkuliahan dengan sistem paket? Di beberapa lembaga yang menerapkan sistem paket, untuk bidang-bidang tertentu, terbukti berhasil. Di bidang Ilmu Agama, misalnya saja Ulumul Quran, Ulumul Hadits, Ushul Fiqih, dan lain-lain selama ini dikuliahkan beberapa SKS dan dalam beberapa semester. Tapi pelajar dan mahasiswa tidak pernah tuntas menguasai bidang-bidang tersebut. Yayasan Muthahhari mengkuliahkan bidang-bidang keagamaan tersebut dengan sistem paket. Ternyata hasilnya bagus. Mahasiswa ITB yang belajar agama hanya memerlukan waktu satu minggu untuk menguasai Ulumul Quran, satu minggu untuk menguasai Ulumul Hadits, satu minggu untuk menguasai Ushul Fiqih, dan seterusnya.

Dengan menggabungkan KBK dan sistem area untuk pengajaran bahasa asing, misalnya saja, mungkinkah UPI ke depan menerapkan mastery learning? Contohnya, untuk Pendidikan Bahasa Inggris, tahap awal mahir berbicara, kemudian mahir menterjemahkan, mahir menulis, mahir berdebat dalam bahasa Inggris, dan seterusnya per-kompetensi! Demikian juga untuk program-program studi lainnya.

Kedua, perlu dibekalkan kemampuan-kemampuan yang sangat diperlukan di era informasi, terutama Bahasa Inggris, Komputer dan Internet. Naisbitt & Aburdeen menyebut, "*English as a Universal Language*". Bahasa Inggris adalah bahasa transpormasi dan media. CNN, BBC, NBC, ABC dan ABN menggunakan Bahasa

Inggris. Lebih dari 80% informasi yang disimpan dalam sejuta komputer di dunia berbahasa Inggris. Diplomasi dan Bisnis Internasional pun menggunakan Bahasa Inggris, selain menjadi lingua franca untuk banyak negara di dunia.

Komputer merupakan jantung masyarakat informasi akan dipergunakan pada semua pekerjaan. Lapangan kerja yang terbuka luas memerlukan ketrampilan menggunakan komputer. Bersama internet, komputer perlu dibekalkan kepada setiap mahasiswa kita.

Ketiga, dengan terjadinya revolusi buku dan informasi perlu dibekalkan pengetahuan yang paling esensial. Selain itu perlu dilatihkan ketrampilan *learning how to learn*. Pendekatan pengajaran jangan ditekankan pada penguasaan materi, melainkan kemampuan belajar. Model pendidikan CTL (*Contekstual Teaching and Learning*), portofolio, dan STS (*Sciences, Technology and Society*) perlu diakrabi oleh setiap dosen dan mahasiswa. Metode inkuiri, discovery, dan metode ilmiah perlu mendominasi pengajaran kita.

Keempat, agama dan sejarah merupakan bidang-bidang yang memotivasi seseorang untuk hidup berharga di tengah-tengah masyarakatnya dan masyarakat dunia. Dalam Islam, Al-Quran adalah "Bacaan Harian", artinya harus dibaca setiap hari. Persoalannya, bagaimanakah Al-Quran yang cukup tebal itu dikuasai dan menjadi pedoman hidup siswa. Diperlukan suatu pendekatan khusus bagaimanakah agar para mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu mengkaji Al-Quran dan ajaran Islam.

Rencana UPI mendirikan *Tutoring Centre* perlu di-*follow-up*-i dengan pembekalan ketrampilan metodologis para dosen dan aksional para dosen untuk mengintegrasikan kurikulum dengan agama dan sejarah.

UPI beruntung tidak latah seperti IKIP-IKIP lain yang segera mengubah diri menjadi Universitas Negeri. UPI tetap bertahan membesarkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Selain itu, keberuntungan UPI lainnya adalah berubahnya status dari perguruan tinggi biasa menjadi perguruan tinggi BHMN.

Bambang Suhendro (1996) mengingatkan, bahwa IKIP merupakan LPTK yang sudah matang untuk otonom sebagaimana universitas lainnya. IKIP sebagai LPTK tidak boleh berkembang ke arah universitas seperti universitas negeri lainnya, tapi harus terus merupakan universitas yang memiliki misi utama untuk mempersiapkan tenaga kependidikan baik pre-service maupun in-service. Pengalaman menunjukkan bahwa perubahan yang menuju ke universitas negeri biasa ternyata mengecilkan peran dan fungsi utamanya sebagai LPTK. Untuk sebuah negeri dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, bila hal ini terulang kembali maka secara nasional kita akan sangat dirugikan.

Otonomi keilmuan hendaknya penuh diberikan ke setiap IKIP, dalam arti: pengembangan kurikulum, pengembangan substansi atau content keilmuan setiap disiplin keilmuan, termasuk penetapan program studi yang diperlukan.

Dalam **Pasal 6** Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2004, disebutkan tentang tujuan UPI sbb:

1. Menghasilkan calon tenaga kependidikan bagi semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, serta profesi dan tenaga ahli dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain.

2. Menghasilkan ilmu, teknologi dan seni serta menyebarkannya untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan nasional.
3. Menghasilkan sumberdaya pendidikan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui peningkatan kualitas hasil, kepeloporan dalam pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan.
4. Menghasilkan sumberdaya pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, adil dan makmur, cinta damai, cinta ilmu dan bermartabat dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mungkin, hanya UPI yang memiliki tujuan seperti tersebut di atas (membesarkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu), yang tidak dimiliki oleh eks IKIP-IKIP lain di seluruh Indonesia.

UPI kini telah berubah status dari perguruan tinggi biasa menjadi perguruan tinggi BHMN (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2004, Tanggal 30 Januari 2004). Secara teoretik, UPI akan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global.

Dengan ditetapkannya UPI sebagai perguruan tinggi BHMN menunjukkan bahwa UPI memang merupakan PTN yang berkualitas. Dalam PP No. 61 tahun 1999 tentang PTN sebagai Badan Hukum, dalam Pasal 4 (3) tentang prasyarat PTN untuk menjadi BHMN disebutkan sbb:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;
- b. memenuhi standar minimum kelayakan financial;
- c. melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Ke depan, **visi UPI** tampaknya perlu dirumuskan sbb: Menjadikan UPI pada tahun 2010 sebagai universitas riset yang melayani (*service-driven university*), memberdayakan, entrepreneurial, memasarkan-diri (market-ing), dan religius.

(1) Universitas Riset (*Research University*)

Abad ke-21 adalah abad ilmu pengetahuan. Masyarakatnya adalah masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based society*).

Kampus masa depan UPI adalah UPI sebagai kampus riset. Kampus riset adalah kampus yang bukan saja sebagai klaim kampus ilmiah tetapi benar-benar sebagai kampus yang *committed* untuk mendorong dan mendanai setiap jenis riset (lapangan dan literature) yang strategis, berorientasi pada pengembangan ilmiah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan kampus riset tentu sangat mahal.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut diperlukan kreativitas entrepreneurial dalam melakukan *fund rising*. Untuk itu pula diperlukan proaktivitas, perjuangan keras dan cerdas dalam membangun kerjasama nasional dan internasional bagi ketercapaian visi UPI sebagai kampus riset.

(2) Universitas yang Melayani

Universitas melayani adalah universitas yang *service-driven* kepada setiap *stakeholder*-nya, baik kepada *internal customer* maupun kepada *external customer*. Untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*-nya, UPI bukan saja harus berani melakukan perubahan-perubahan strategis terutama menyangkut paradigma kepemimpinan dan manajemennya tetapi juga harus membangun budaya *good government* dan transparansi informasi.

Dengan begitu pula, maka peningkatan kualitas akademis, intelektual, metodologis, dan profesional kepemimpinan, manajemen, tenaga edukatif dan staf; pembangunan sistem *information-driven university*, baik menyangkut administrasi, pengelolaan informasi pendidikan dan pembelajaran dan turunan-turunan semua itu, untuk memberikan kepuasan, bahkan kebahagiaan, kepada pelanggan merupakan hal yang niscaya. Oleh karena itu pula, *digital-driven university* mendesak untuk segera dilakukan.

(3) Empowering University

Sebagai universitas, bagaimana pun, UPI adalah Universitas yang memiliki segudang dan potensi keunggulan. Malangnya, selama ini keunggulan-keunggulan yang sangat mahal, dan bahkan tak ternilai itu, belum dikelola dan diberdayakan dengan seoptimal, seproduktif dan seentrepreneurial mungkin. Akibatnya, UPI mengalami kehilangan besar (*great lost*). Oleh karena itu, UPI harus menjadi Universitas yang *people-driven* dan memberdayakan (*Empowering University*). Untuk mewujudkan visi tersebut maka harus dibangun bukan saja komitmen tetapi juga budaya aktivisme dan inovasi. Oleh karena itu UPI masa depan harus menjadi universitas yang -- meminjam ungkapan ahli strategi paling berpengaruh di Amerika Serikat dan Eropa, Gary Hamel, dalam *Leading the Revolution* (2000) -- *activist-friendly revolution ready university*.

(4) Entrepreneurial University

Abad ke-21 adalah abad entrepreneurship (*the entrepreneurial age*). Oleh karena itu, organisasi dan lembaga apa pun, tak kecuali sebuah universitas seperti UPI, jika mau mewujudkan visi di atas, mau maju, dan menjadi kampun yang berkualitas secara nasional, bahkan internasional, harus dipimpin dan dikelola dengan paradigma entrepreneurial. UPI masa depan haruslah UPI yang selalu berprestasi dan sukses mewujudkan visi-visinya melalui inovasi dan kreativitas entrepreneurialnya. Sebagai sebuah paradigma, entrepreneurship adalah sebagai perjuangan keras dan cerdas dalam menciptakan nilai tambah, dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mengaktifkan fungsi seluruh sumber daya yang dimiliki.

(5) Marketing University

UPI adalah lembaga pendidikan. Bukan lembaga bisnis. Meski demikian, untuk maju UPI harus dipimpin dan dikelola dengan pendekatan marketing-driven. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik kepada UPI akan terus meningkat.

Tanpa menjadikan UPI sebagai marketing University, bukan saja kita akan sangat sulit kita akan melakukan hal-hal di atas tetapi juga tidak akan mampu memberikan kepuasan kepada setiap stakeholder-nya.

(6) Religious University

Religius di sini bisa bermakna ganda: teologis dan korporatif. Religiusitas bukan sebuah klaim, melainkan sebuah aksi yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh setiap *stakeholder*. Kepemimpinan dan manajemen masa depan yang akan berhasil adalah kepemimpinan dan manajemen yang spiritual. Dengan paradigma itulah, sebuah kampus bukan saja akan berjuang membangun nilai dan komitmen sesuai dengan tradisi yang dianut para *stakeholder*-nya tetapi juga akan memotivasi mereka. Demikian juga, tanpa budaya keunggulan “korporat” atau tanpa – meminjam istilah Jesper Kunde (Corporate Religion, 2000) – *Corporate Religion* bukan saja tidak akan memiliki nilai yang tangguh untuk *survive*, tumbuh, berkembang dan maju, tetapi juga tidak akan mampu mewujudkan visinya.

C. PENUTUP

Untuk maju dan menjadi kebanggaan setiap *stakeholder*-nya UPI harus dipimpin dan dikelola oleh mereka yang bukan saja memiliki komitmen religius dan spiritual yang sejalan dengan pandangan dunia tauhid tetapi juga siap mengimplementasikan *religious university* dalam pengetahuan di atas.

Jika mau sangat dipercaya pasar, lebih maju, dan sangat sejahtera, maka ke depan UPI harus menjadi:

- Universitas Riset (Research University)
- Universitas Melayani (Service-Driven University)
- Universitas Pemberdaya (Empowering University)
- Universitas Entrepreneurial (Entrepreneurial University)
- Universitas Memasarkan-Diri (Market-ing University), dan
- Universitas Religius (Religious University)

DAFTAR PUSTAKA

- Brojonegoro, Satrio Sumantri. 1997. *Pembinaan Tenaga Akademik Program Pascasarjana dalam Angka*. Makalah ini disampaikan pada Rapat Kerja PPS se-Indonesia di Ambarawa, 27-29 Juni 1997.
- Djojonegoro, Wardiman. 1995. *Posisi dan Peranan IKIP dalam Menghadapi Tantangan Masa Sekarang dan Masa Depan*. Orasi ilmiah di IKIP Bandung, Oktober 1995.
- Micklethwait, John & Wooldridge, Adrian. 2000. *A Future Perfect: The Challenge and Hiddin Promise of Globalization*, New York: Crown Publishers.
- Naisbitt, John. 1995. *Global Paradox*, New York: Avon Books.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999, Tanggal 24 Juni 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2004, Tanggal 30 Januari 2004, tentang Penetapan UPI sebagai BHMN.
- Rusman, Entis Sutisna dan Haninda Bharata. 2003. *Learning: The Treasure Within*, Laporan Buku, Program Pasca Sarjana (S3) UPI.
- Sigit, Sarjono. 1992. *Peranan dan Partisipasi Perguruan tinggi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Suhendro, Bambang. 1996. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*.
- Supriadi, Dedi. 1997a. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Supriadi, Dedi. 1997b. *Globalisasi dan Pendidikan: Implikasi pada Perguruan Swasta Menghadapi Abad Ke-21*, Makalah disajikan dalam diskusi Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jawa Barat, 22-12-1997.
- Task Force Pendidikan Tinggi. 1999. *Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan tinggi*, Ringkasan Eksekutif, Jakarta: BAPPENAS bekerja sama dengan Bank Dunia.
- UNDP, 1997. *Human Development Report 1996*, New York: United Nations Development Programme.